

BAB I

PENDAHULUAN

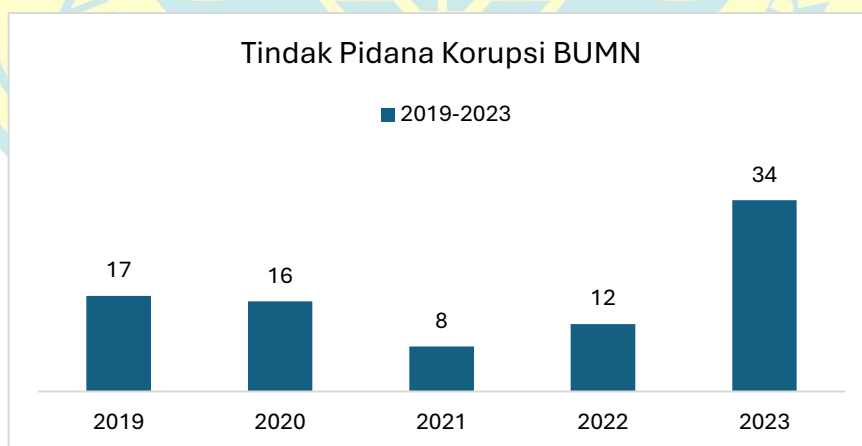
1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan berfungsi sebagai dokumentasi yang mengandung data penting bagi berbagai pihak, termasuk investor, kreditur, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat, guna mendukung proses evaluasi serta pengambilan keputusan (Oktaviana & Paramitha, 2021). Pelaporan keuangan memuat unsur-unsur penting seperti penyajian informasi yang relevan dan dapat dipercaya mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta arus kas. Informasi ini menjadi dasar bagi para pengguna laporan untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan.

Di dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ditetapkan bahwa prinsip-prinsip pelaporan keuangan disusun untuk menjamin ketepatan dan keterbukaan serta mampu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan. Dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan ditekankan pentingnya relevansi agar informasi dapat membantu proses pengambilan keputusan (PSAK 1), serta keharusan representasi yang jujur untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya (PSAK 25). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan keandalan laporan keuangan di mata para pemangku kepentingan.

Keputusan yang tepat idealnya bersumber dari laporan keuangan yang memiliki tingkat integritas tinggi. Integritas dalam laporan keuangan merefleksikan penyampaian informasi yang akurat dan bebas dari pengaruh manajerial yang disengaja untuk mengubah atau memanipulasi data (Indah et al., 2023). Ketika kinerja perusahaan tidak memenuhi ekspektasi, manajemen kerap melakukan manipulasi pencatatan agar kondisi perusahaan tampak baik secara finansial. Praktik tersebut biasanya bertujuan untuk menciptakan citra positif di hadapan investor maupun pihak lain yang menggunakan laporan keuangan (Srikandhi & Suryandari, 2020).

Perusahaan BUMN dikenakan kebijakan audit berlapis sebagai upaya menjaga integritas laporan keuangan. Kebijakan tersebut ternyata tidak begitu efektif. Perlu diketahui bahwa dalam kurun lima tahun terakhir (2019-2023) angka kasus kecurangan di lingkungan BUMN tetap tinggi dan belum memperlihatkan indikasi penurunan.

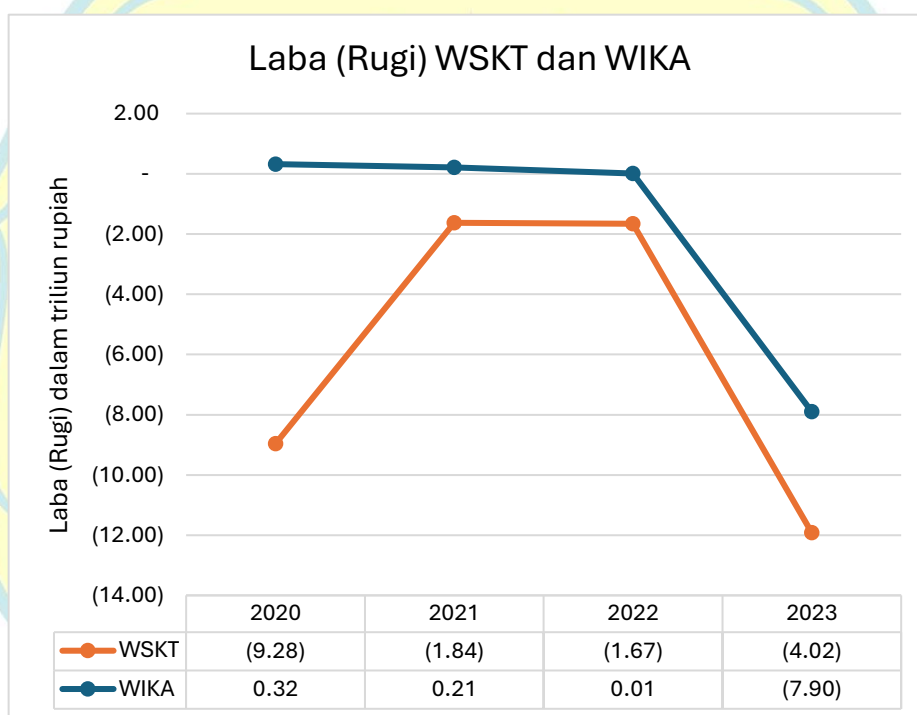


Gambar 1.1 Angka Kecurangan di BUMN Tahun 2019-2023

Sumber: www.kpk.go.id, diolah oleh penulis (2024)

Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2023 menunjukkan, dua BUMN, Waskita Karya (WSKT) dan Wijaya Karya (WIKA), terindikasi memanipulasi laporan

keuangan serta memiliki masalah dan teknik rekayasa yang serupa (Majalah Tempo, 2023). Dimulai dari kecurigaan bank atas ketidaksesuaian tagihan saat kedua perusahaan tersebut melakukan restrukturisasi kredit, ditambah dengan kasus proyek fiktif yang melibatkan direktur utama PT Waskita Karya pada April 2023. Teknik rekayasa yang digunakan oleh WSKT dan WIKA adalah dengan menyembunyikan tagihan vendor sejak 2016, sehingga jumlah liabilitas kurang saji dari yang sebenarnya dan kondisi keuangan perusahaan terlihat sehat.



Gambar 1.2 Laba (Rugi) WSKT dan WIKA

Sumber: Laporan Keuangan Entitas, diolah oleh penulis (2024)

Pada tahun 2024, dua perusahaan publik BUMN sektor farmasi terjerat kasus serupa. Berdasarkan hasil temuan BPK, terdapat indikasi *window dressing* pada laporan keuangan PT Kimia Farma (KAEF) dan PT Indofarma (INAF) (Katadata, 2024). Kasus indofarma bermula pada bulan Maret 2024, saat muncul isu pembayaran gaji karyawan yang menunggak, sehingga kementerian BUMN

melaporkan dugaan *fraud* pada entitas anak Indofarma, PT Indofarma Global Medika (IGM) di bulan Mei. Manipulasi ini melibatkan jajaran manajemen induk dalam pembuatan piutang/hutang, klaim diskon, dan uang muka fiktif, melakukan penjualan ke entitas anak, dan mencari pendanaan non perbankan serta menitipkan dana ke para vendor. Dana tersebut digunakan untuk menutupi defisit dan juga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Manajemen melakukan hal tersebut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian target dan kinerja keuangan yang sehat. Dampak dari manipulasi laporan keuangan ini adalah kerugian negara sebesar Rp 371 miliar (Humas BPK, 2024). Indofarma juga harus menjual aset-asetnya untuk melunasi tunggakan gaji karyawan sebesar Rp 95 miliar. Sedangkan untuk PT Kimia Farma, entitas anaknya, PT Kimia Farma Apotek (KFA) melakukan *mark up* atas nilai penjualan melalui distribusi seolah-olah mencapai target sehingga KFA yang sebenarnya rugi dilaporkan laba (Bloomberg, 2024). Pelanggaran integritas ini menyebabkan KAEF merugi sebesar Rp 1,82 triliun.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerimaan Negara dari BUMN

Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara Tahun 2020 – 2023 (dalam triliun rupiah)						
Tahun	Kontribusi BUMN				Total Penerimaan Negara	Persentase (%)
	Pajak	Dividen	PNBP	Jumlah		
2020	247	44	86	377	1.629	23%
2021	278	30	87	395	2.006	20%
2022	410	40	98	548	2.630	21%
2023	457	81	84	622	2.634	24%

Sumber: CNBC Indonesia & BPS Indonesia, Diolah oleh penulis (2024)

Kasus kecurangan keuangan yang melibatkan perusahaan milik negara (BUMN) sangat mengkhawatirkan, mengingat BUMN memainkan peran sosial ekonomi yang penting di Indonesia. BUMN berkontribusi penting terhadap ekonomi negara, melalui GDP, penyediaan lapangan kerja, dan perluasan pasar

(Dharmayuni et al., 2020). Di Indonesia, kontribusi BUMN cukup signifikan terhadap penerimaan negara dan semakin meningkat setiap tahunnya. Kontribusi tersebut dapat dilihat pada data di Tabel 1.1.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 2023, BUMN menguasai 22,5% nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia, berasal dari 37 perusahaan induk maupun entitas anak BUMN yang sudah IPO. Tiga belas di antaranya masuk ke dalam daftar indeks LQ45, yang terdiri atas kelompok saham dengan tingkat likuiditas tinggi dan berkapitalisasi besar di bursa. Hal ini kembali menunjukkan peran signifikan BUMN dalam perekonomian Indonesia baik dalam hal likuiditas dan stabilitas pasar modal maupun pengaruh strategis dalam berbagai sektor industri.

Tabel 1.2 Bidang Usaha dan Jumlah Perusahaan BUMN

No	Klaster Usaha	Jumlah BUMN
1	Energi, minyak, dan gas	2
2	Kesehatan	1
3	Manufaktur	2
4	Mineral dan batu bara	2
5	Pangan dan pupuk	3
6	Perkebunan dan kehutanan	2
7	Asuransi dan dana pensiun	5
8	Infrastruktur	9
9	Keuangan	4
10	Logistik	8
11	Pariwisata dan pendukung	3
12	Telekomunikasi dan media	24
Total		65

Sumber: Kementerian BUMN RI, Diolah oleh penulis (2024)

Kontribusi signifikan BUMN dapat menjadi bumerang yang mengancam pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan publik jika tindakan kecurangan terus terjadi. Ketidakpercayaan publik terhadap informasi keuangan menimbulkan keterbatasan akses terhadap kredit, penarikan investasi yang tidak terkendali, menurunkan kestabilan sistem keuangan, dan mengancam stabilitas ekonomi secara

keseluruhan (Litovtseva et al., 2023). Sejumlah kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan beberapa perusahaan BUMN, seperti Indofarma, Kimia Farma, Waskita Karya, dan Wijaya Karya, menegaskan pentingnya penelitian mengenai berbagai faktor yang memengaruhi integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang tercatat di BEI.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi tingkat integritas laporan keuangan, di antaranya adalah kepemilikan institusional (Oktaviana & Paramitha, 2021; Yuniawati, 2023), komisaris independen (Meiryani et al., 2023; Fitrianingsih et al., 2023; Abbas, Siregar & Basuki, 2021; Mashuri, Ermaya & Fahria, 2023; Abbas et al., 2021), ukuran perusahaan (Fadilah & Nurasik, 2022; Sormin, 2021; Abbas, Siregar & Basuki, 2021), kepemilikan manajerial (Sormin, 2021), modal intelektual (Palebangan & Majidah, 2021), *audit tenure* (Pitria & Miftah, 2024; Wulandari, Ermaya & Mashuri, 2021), komite audit (Pitria & Miftah, 2024; Fitrianingsih et al., 2023; Abbas, Siregar & Basuki, 2021), independensi auditor (Auliyah, Fitriyani & Herawaty, 2022), kualitas audit (Putri & Setiawan, 2023; Prena & Cahyani, 2020), reputasi auditor (Auliyah, Fitriyani & Herawaty, 2022), *audit fee* (Nurmala, Bustanti & Adiwibowo, 2021), spesialisasi industri auditor (Suhendra & Majidah, 2020), profitabilitas (Fadillah & Putri, 2023), *financial distress* (Wulandari, Ermaya & Mashuri, 2021), dan *leverage* (Palebangan & Majidah, 2021; Fadillah & Putri, 2023; Fadilah & Nurasik, 2022).

Berdasarkan hasil kajian terhadap studi terdahulu, penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan menggunakan modal intelektual,

profitabilitas, dan *audit tenure* masih jarang ditemukan. Di sisi lain, studi terkait yang menggunakan faktor komisarisi independen menunjukkan hasil yang beragam dan kontradiktif, sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih konsisten.

Komisaris independen berperan penting dalam meningkatkan transparansi dalam operasional BUMN melalui pengawasan yang objektif, terutama untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, komisarisi independen kurang memiliki keahlian untuk menilai laporan keuangan atau terdapat campur tangan pihak lain dan budaya perusahaan yang membatasi peran pengawasan mereka. Menurut Abbas, Siregar, dan Basuki (2021), keberadaan komisarisi independen dalam perusahaan BUMN justru bisa memberikan dampak negatif terhadap integritas laporan keuangan, khususnya ketika jumlahnya terlalu banyak sehingga menimbulkan konflik internal serta perbedaan pandangan yang berpotensi menghambat efektivitas fungsi pengawasan. Selain itu, penempatan komisarisi independen terkadang hanya bersifat formalitas guna memenuhi aspek kepatuhan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Meiryani et al. (2023) serta Mashuri, Ermaya, dan Fahria (2023) menemukan bahwa keberadaan komisarisi independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka dalam memberikan pengawasan yang lebih efektif, karena kedudukan mereka yang tidak terikat pada kepentingan internal perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi komisarisi independen lebih tinggi umumnya menunjukkan kapasitas yang lebih baik dalam

menangani risiko dibandingkan dengan perusahaan yang proporsi komisaris independennya lebih rendah.

Tingkat integritas laporan keuangan umumnya lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki modal intelektual yang kuat (Palebangan & Majidah, 2021). Hal ini disebabkan oleh kualitas modal intelektual yang mampu mendorong kinerja yang lebih baik, sehingga hasil laporan keuangan pun menjadi lebih andal dan sesuai standar. Sebaliknya, jika terjadi manipulasi dalam laporan keuangan, hal tersebut bisa mengindikasikan adanya kelemahan dalam modal intelektual, seperti kurangnya kompetensi atau lemahnya etika kerja sumber daya manusia. Dengan demikian, pengembangan modal intelektual melalui pelatihan dan penguatan etika profesi dinilai penting untuk mendorong integritas dalam pelaporan keuangan. Namun, tidak semua penelitian mendukung pandangan tersebut. Mashuri, Ermaya, dan Fahria (2023) justru berpendapat bahwa peningkatan modal intelektual tidak berdampak signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Bahkan, modal intelektual dengan kualitas tinggi dinilai berisiko jika tidak dikelola dengan baik, karena dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan oleh pihak internal perusahaan.

BUMN cenderung menghasilkan lebih sedikit laba daripada perusahaan non BUMN (Amin & Haq, 2021). Penyebabnya adalah campur tangan pemerintah yang tinggi (Sun et al., 2021) dan kebijakan harga jual yang rendah (Matuszak & Kabaciński, 2021). Ketika kinerja perusahaan berada dalam kondisi yang kurang optimal, laporan keuangan sering kali tidak mencerminkan permasalahan sebenarnya yang sedang dihadapi. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas

tinggi umumnya dipandang memiliki kinerja baik, yang membuat laporan keuangannya disusun secara transparan tanpa menyembunyikan kondisi tertentu. Pandangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Fadillah dan Putri (2023), profitabilitas ditemukan berkontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan integritas laporan keuangan. Namun, Tantrianna (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas, manajer justru terdorong melakukan manajemen laba, misalnya melalui akrual, untuk mengurangi beban pajak atau meratakan laba yang fluktuatif, yang pada akhirnya dapat menurunkan integritas laporan.

Pitria dan Miftah (2024) mengungkapkan bahwa audit tenure, yakni durasi hubungan antara auditor dan klien, berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Perikatan dengan durasi yang panjang dinilai dapat menumbuhkan kedekatan yang membuka peluang terjadinya kolusi antara auditor dan pihak manajemen, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kredibilitas laporan yang dihasilkan. Selain itu, independensi auditor juga berisiko menurun karena auditor mungkin akan lebih mudah mengakomodasi keinginan manajemen. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Wulandari, Ermaya, dan Mashuri (2021) yang menyatakan bahwa *audit tenure* justru memengaruhi integritas laporan keuangan secara positif. Penelitian mereka mengemukakan bahwa durasi perikatan auditor dengan perusahaan yang semakin panjang, membuat pemahaman auditor terhadap kondisi dan karakteristik perusahaan semakin baik, sehingga proses audit dapat berjalan lebih mendalam, efisien, dan efektif.

Dengan mempertimbangkan latar belakang, fenomena yang telah dipaparkan, serta masukan dari penelitian sebelumnya yang menyarankan agar sektor dan periode pengamatan diperluas, peneliti tertarik mengeksplorasi bagaimana keberadaan komisaris independen, modal intelektual, profitabilitas, serta *audit tenure* memengaruhi tingkat integritas laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021-2023.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Setelah melakukan identifikasi terhadap isu-isu yang ada, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah Komisaris Independen memengaruhi Integritas Laporan Keuangan?
2. Apakah Modal Intelektual memengaruhi Integritas Laporan Keuangan?
3. Apakah Profitabilitas memengaruhi Integritas Laporan Keuangan?
4. Apakah *Audit Tenure* memengaruhi Integritas Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, studi ini difokuskan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Untuk menganalisis peran komisaris independen dalam meningkatkan integritas laporan keuangan perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis peran modal intelektual terhadap integritas laporan keuangan perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis peran profitabilitas terhadap integritas laporan keuangan perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

4. Untuk menganalisis peran *audit tenure* terhadap integritas laporan keuangan perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan supaya mampu memberikan kontribusi baik dalam lingkup akademis maupun praktis melalui manfaat berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mendukung pengembangan Teori Keagenan dalam konteks integritas laporan keuangan.
2. Memperkaya literatur mengenai integritas laporan keuangan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
3. Memberikan kontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur serta menjawab perbedaan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu terkait pengaruh komisaris independen, modal intelektual, profitabilitas, dan *audit tenure* terhadap integritas laporan keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi bagi manajemen dan dewan pengawas untuk memperkuat fungsi komisaris independen serta meningkatkan pemanfaatan modal intelektual dalam menjaga integritas laporan keuangan.
2. Menjadi referensi bagi regulator seperti pemerintah dan Bursa Efek Indonesia dalam merumuskan kebijakan terkait tata kelola perusahaan, masa penugasan auditor, dan mekanisme pengawasan, khususnya pada perusahaan BUMN yang tercatat di BEI.

3. Membantu auditor dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan laporan keuangan melalui analisis terhadap variabel-variabel seperti proporsi komisaris independen, modal intelektual, tingkat profitabilitas, dan *audit tenure*.
4. Menjadi acuan bagi investor dalam mengevaluasi keandalan laporan keuangan sebelum melakukan investasi.

